

BAB IV

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menindak lanjuti INPRES Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah.

Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam LKjIP ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kinerja yang baik dalam memenuhi target indikator dalam Rencana Strategis 2025-2029. Walaupun masih ada indikator yang realisasi capaiannya masih dibawah 100%. Adapun indikator terbut dijabarkan sebagai berikut :

1. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak sebesar 106,15%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan data realisasi yang didapat secara konkuren dari kabupaten/kota menunjukkan kenaikan persentase akses sanitasi layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) yang terlayani. Hal ini merepresentasikan cakupan pelayanan akses sistem air limbah ke rumah-rumah penduduk telah memenuhi target yang telah ditentukan;

2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dengan capaian kinerja sebesar 101,12%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik telah banyak hunian/rumah yang telah memenuhi 4 kriteria sebagai hunian/rumah layak huni yaitu :

1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m/kapita;
2. Memiliki akses terhadap air minum layak;
3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak;
4. Ketahanan bangunan yaitu atap terluas berupa beton/ganteng/seng/kayu/sirap, dinding terluas berupa marmer / granit / keramik / parket / vinil / karpet / ubin / tegel/ teraso / kayu / papan/ semen / bata merah.

Terdapat juga program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang dikenal sebagai program bedah rumah, yang fokus memperbaiki RTLH agar memenuhi kriteria ketahanan bangunan dan sanitasi serta terdapat program 3 juta rumah untuk mempercepat penyediaan hunian bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah.

3. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan dengan capaian kinerja dengan capaian kinerja sebesar 179,21% . Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya kerjasama dengan PDAM dalam penyediaan jaringan perpipaan di wilayah perkotaan.

Serta kecukupan sumber air baku, jaringan perpipaan yang luas dan terpelihara, teknologi pengolahan yang sesuai, dan tingkat kebocoran air yang rendah.

Namun, masih terdapat Indikator Kinerja dengan besaran capaian masih dibawah 100%. Indikator kinerja tersebut yaitu :

1. Akses Air Minum Layak sebesar 97,17% belum mencapai target karena dampak dari penggunaan air yang bersumber dari air leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Dalam hal ini realisasi capaian pada tahun 2025 didapatkan secara konkuren dari kabupaten/kota yang menunjukkan hasil persentase cakupan akses air minum layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten/Kota yang terlayani. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Prov SumSel menunjukkan bahwa beberapa kabupaten masih memiliki capaian rendah dalam pengawasan sarana air minum, yang menyebabkan kualitas air yang sampai ke rumah tangga tidak selalu masuk kategori layak meski sumbernya ada.

4.1 Langkah Strategis

1. Perlu ada pembahasan bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan akan tetap melaksanakan program bedah rumah untuk meningkat kualitas RTLH, penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan melakukan penyediaan infrastruktur dasar serta melaksanakan kerjasama dengan CSR.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan akan terus melakukan pembangunan dan menyelenggarakan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman. Program ini berfungsi sebagai peta jalan untuk memastikan pembangunan infrastruktur sanitasi di setiap kabupaten/kota terukur dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme PDAM dalam tata kelola layanan air, memperluas jaringan perpipaan ke kawasan perkotaan yang belum terlayani serta menurunkan tingkat kebocoran air untuk meningkatkan efisiensi distribusi.

Dengan bekal keikhlasan, tekad dan kerja keras serta rasa kebersamaan dari berbagai pihak yang terkait akan mampu memenuhi pencapaian sasaran kinerja yang lebih baik lagi dalam rangka mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dibidang keciptakaryaan.

Akhirnya dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dimasa mendatang.

Palembang, 30 Januari 2026

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan



Ir. H. Novian Aswardani, ST., M.M., IPM., ASEAN.Eng

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004